BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

e-Government merupakan aspek penting yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan transaksi dengan masyarakatnya dalam hal pelayanan publik maupun untuk melakukan kegiatan administratif agar lebih efektif dan efisien. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government* adalah peraturan yang menangani masalah strategi pengembangan *e-Government* di lingkungan pemerintahan Indonesia. Inpres tersebut menjadi landasan hukum mengenai implementasi *e-Government* di setiap instansi pemerintahan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NO.PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN) dalam hal ini merupakan lembaga yang ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mengembangkan suatu sistem informasi yang bernama Kios *3 in 1*. Sistem informasi kios *3 in 1* ini merupakan suatu program yang memiliki keunggulan dalam hal menyediakan informasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja. Dimana masyarakat dapat mengakses kebutuhan mengenai informasi pelatihan, sertifikasi dan

penempatan kerja dengan membuka website http://*kios3in1.net*. Sistem informasi kios *3 in 1* bekerjasama dengan pihak-pihak swasta yang sudah terkoneksi dengan BBPLKDN Bandung sehingga kerjasama dapat terhubung dengan baik antara pencari kerja dan pihak yang membutuhkan tenaga kerja.

Konsep *e-Government* di instansi pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan penggunaan internet memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan khususnya pelayanan yang ada di BBPLKDN Bandung. Apabila kualitas pelayanan sudah dapat dilakukan dengan optimal akan berdampak pada efesiensi dan efektivitas kinerja aparaturnya.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri Bandung dalam implementasi sistem informasi kios *3 in 1* mengalami beberapa permasalahan sebagai tantangan yang harus di hadapi untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang akan datang, itu semua terlihat pada penjelasan berikut ini: *Pertama,* permasalahan yang berhubungan dengan proses komunikasi. Peserta pelatihan yang mengakses kios *3 in 1* tidak mendapatkan materi pelatihan secara mendetail di kios *3 in 1* serta biaya pelatihan yang tidak di cantumkan di website kios *3 in 1* agar orang tua atau calon peserta pelatihan yang melakukan akses melalui website http://kios3in1.net sebelumnya memiliki gambaran tentang data biaya, persyaratan, dan modul apa yang akan di pelajari lalu setelah itu di konfirmasi kembali ke pihak *Customer Service Officer (CSO)* dengan begitu komunikasi akan berjalan lebih efektif kenyataannya hal tersebut belum

terimplementasikan secara optimal, karena permasalahan mengenai data biaya, persayaratan, serta modul pelatihan belum ada di dalam menu kios *3 in 1*.

Kedua, permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya aparatur. Masih kurangnya sumber daya ahli yang dapat mengelola kios *3 in 1.* Hanya ada dua orang staf yang ahli dan itu merangkap sebagai instruktur di BBPLKDN Bandung, itu berarti pelimpahan tanggung jawab tidak sesuai dengan fungsinya. Sumber daya peralatan yaitu perlengkapan komputer yang ada di ruangan komputer dalam hal perawatannya belum maksimal dari 10 unit komputer yang ada di ruangan kios *3 in 1* hanya lima saja yang dapat digunakan, ada beberapa keluhan saat masyarakat datang mengenai akses internet yang terkadang lama, dan komputer hanya dapat digunakan beberapa saja. Komputer-komputer yang ada di ruangan kios *3 in 1* tidak semuanya dapat digunakan, ada beberapa komputer yang rusak tetapi tidak ditangani untuk di perbaiki.

Ketiga. permasalahan yang berkaitan dengan disposisi. Masih lamanya proses yang dilalui oleh aparatur kios *3 in 1* untuk mengurus prosedur kerusakan barang/fasilitas kios *3 in 1.* Apabila ada fasilitas kios *3 in 1* yang rusak prosedurnya harus melalui berita acara (BAP) kerusakan fasilitas kios *3 in 1* serta membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Disposisi seperti itu masih kurang efektif.

Keempat, permasalahan belum adanya aturan teknis standar operasional prosedur yang dibuat oleh pihak BBPLKDN Bandung mengenai

implementasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut serta fenomena-fenomena mengenai implementasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung, maka penulis mengambil judul Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai berikut: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KIOS *3 IN 1* DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA DALAM NEGERI (BBPLKDN) BANDUNG."**

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menjelaskan fokus masalah yang dalam KKL ini, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan sistem informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung?
2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan sistem informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung?
3. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan sistem informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan KKL

Maksud dari KKL ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung. Sedangkan tujuan KKL ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi kebijakan sistem informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung.
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam implementasi kebijakan sistem informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung.
3. Untuk mengetahui disposisi dalam implementasi kebijakan sistem informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sistem informasi kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung.

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Sejalan dengan permasalahan di atas diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis, yaitu diharapkan dapat memahami dan menambah wawasan serta dapat memberikan manfaat tentang makna dari implementasi *e-Government* melalui kebijakan kios *3 in 1* di BBPLKDN Bandung.
2. Bagi kegunaan ilmiah, diharapkan hasil KKL ini dapat dijadikan bahan informasi bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya Mata Kuliah *e-Government*.
3. Kegunaan praktis, dari hasil KKL ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah khususnya BBPLKDN Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik dengan *e-Government.*

1.5 Kerangka Pemikiran

Implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

> "Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement.* Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practicial effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". (Kamus Webster dalam Wahab, 2008:64)

Berdasarkan pengertian di atas implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Suatu badan atau lembaga pemerintah seperti BBPLKDN Bandung yang berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memerlukan suatu kebijakan untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Carl Friedrich yang dikutip Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakasanaan Negara.*

> "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang dinginkan". (Carl Friedrich dalam Wahab,2008:3).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun tidak dilakukan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kebijakan menurut Sharkansky dalam Widodo adalah: *"What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs".* (Sharkansky dalam Widodo, 2010:12)

Di bawah ini merupakan pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah:

> *"Policy Implementation as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects."* (Edward III, 1980:1)

Definisi di atas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan di atas, George C. Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi

keberhasilan suatu implementasi dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy*, yaitu:

> *"Aside from directly affecting implementation, however, they also indirectly affect it trough their impact on each in other words communications affect resources dispositions and bureaucratic structures which in turn influence implementation."* (George III Edward,1980:147).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan George C. Edward III di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi, adalah sebagai berikut

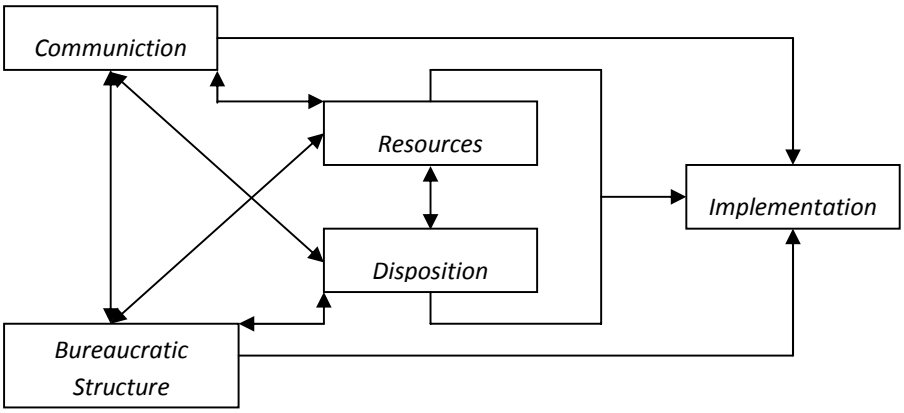
1. *Comunication*
2. *Resources*
3. *Disposition*
4. *Bureaucratic Structure.*

(Edward III 1980: 9-10)

Berdasarkan pengertian Implementasi menurut Edward III diatas, bahwa suatu implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, sikap para pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi yang dimana hal tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan.

Dengan demikian, model pendekatan implementasi menurut Edward III dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Model Pendekatan Implementasi Menurut George C. Edward III



Sumber: George III Edwards, (1980:148).

Keberhasilan suatu implementasi menurut Edwards III dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Communication* (Komunikasi)
   "Inadequate communications also provide implementors with dicretion as they attempt to turn general policies into specific actions. This discretion as they attemp to turn general policies into specific actions. This discretion will not necesarily be exercised to further the aims of the original decision makers. Thus, implementation instruction that are not transmitted, that are too precise may hinder implementation. Conservely, directives that are too precise may hinder implementation. Conversely, directives taht are too precise may hinder implementation by stifling creativity and adaptability." (George III Edwards, 1980:10).

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga

setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

2. *Resource* (Sumber daya)
   "No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of the others involved in implementation; the outhority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide services. Insufficients resources will mean that laws will not be enforced, services will not provided, and reasonable regulation in policy implementation." (George III Edwards, 1980:10-11).

Menurut George C. Edwards III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C. Edwards III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia,

biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. Sumber daya terdiri dari fasilitas dan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan guna tercapainya suatu implementasi.

3. *Disposition* (Disposisi).
   "This dispisition or attitudes of implementors is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementatition is to proceed effectively, not only must implenentors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of pilicies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies themselves. The way in which implementors exercise their discretion, however, depends in large part upon their disposition toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies affecting their organizational and personal interests." (George III Edwards, 1980:11).

Menurut George C. Edwards III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana).

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi sangat penting, karena kinerja pelaksanaan kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

4. *Bureaucratic structure* (Struktur birokrasi)
   "Even if sufficient resources to implement a olicy exits and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic stricture. Organizational fregmentatition may hinder the coordination necessary to implement succesfully a complex policy requaring the coopation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important function being overloocked." (George III Edwards, 1980:11-12).

Menurut George C. Edwards III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi dalam suatu badan sangat berperan penting dimana untuk menentukan keberhasilan dari suatu implementasi

kebijakan dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tertata rapih guna tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati bersama.

Pengertian *e-Government* menurut World Bank yang dikutip oleh Eko Indrajit dalam bukunya yang berjudul *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* adalah:

> *"e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, business and other arms of government"*. (World Bank dalam Indrajit, 2006:3)

Pengertian *e-Government* menurut World Bank di atas bermakna bahwa *e-Government* merupakan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan informasi untuk masyarakat yang dalam hal ini proses transformasi terjadi dari pemerintah kepada pihak swasta yaitu masyarakat bisnis yang bekerjasama dengan pemerintah. Teknologi informasi itu seperti penggunaan *Wide Area Network*, jaringan internet dan *Mobile Computing*, fasilitas teknologi informasi itu yang memberikan kemudahan bagi proses transformasi data dari pemerintah kepada pihak swasta (masyarakat bisnis).

Sistem informasi merupakan bentuk penerapan dalam sebuah organisasi, dimana penerapan/penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi tersebut untuk mendukung dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menyediakan informasi yang berguna di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Suatu organisasi yang tumbuh dan menjadi

lebih kompleks membuat manajemen melakukan permintaan yang semakin besar terhadap fungsi sistem informasi. Menurut pendapat Tata Sutabri dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen mendefinisikan sistem informasi, sebagai berikut:

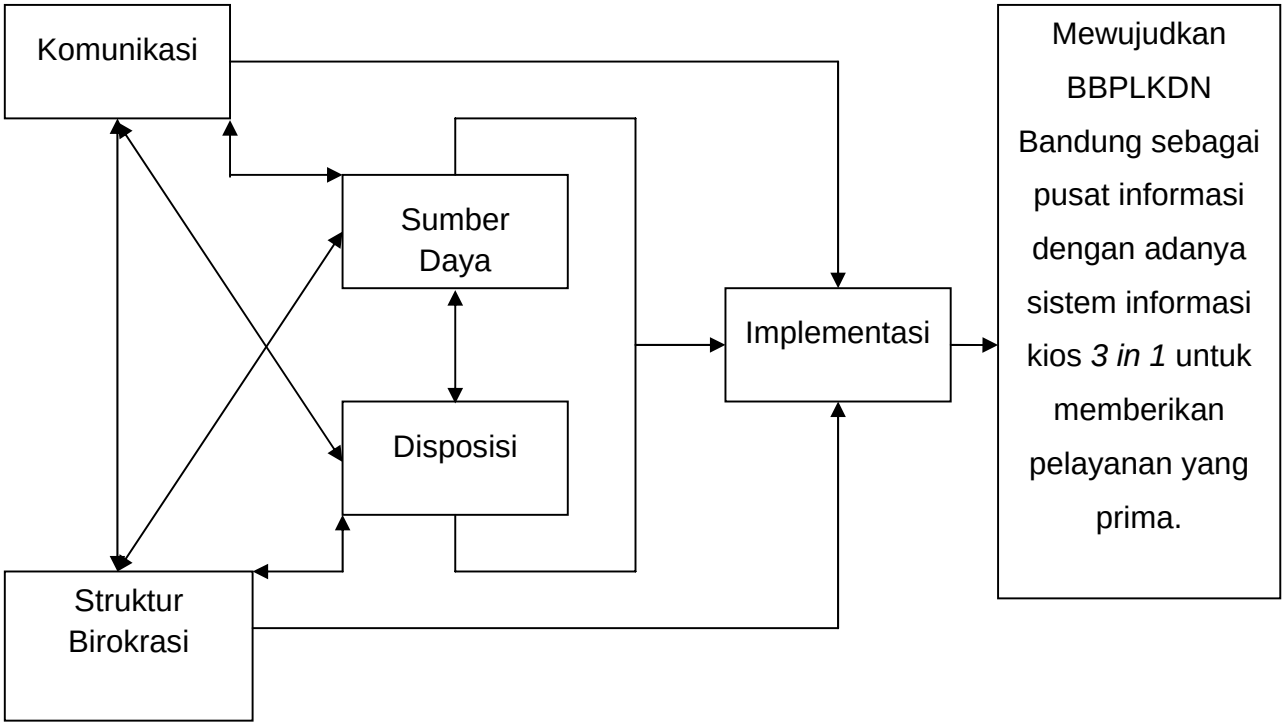
> “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan” (Susanto, 2004:42).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur informasi penting guna memproses tipe transaksi rutin tertentu yang menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Sistem informasi juga merupakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR PER.07/MEN/IV/2011 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi bahwa kios *3 in 1* itu merupakan sistem informasi yang terhubung dengan internet berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.2
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Dalam Laporan KKL

1.6.1 Metode Dalam Laporan KKL

Metode dalam laporan KKL yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan atau fenomena yang nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Sanapiah Faisal dalam bukunya

Format-Format Penelitian Sosial, mendefinisikan pengertian penelitian deskriptif (*descriptive research*), sebagai berikut:

> "Untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis, berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori" (Faisal, 1999:20).

Pendekatan yang digunakan dalam laporan KKL adalah kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah:

> "Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*" (Sugiyono, 2005:1).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2005:3). Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada *generalisasi*, akan tetapi lebih menekankan pada makna.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam KKL ini adalah melalui:

1. Observasi partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada dengan menggunakan indera penglihatan di BBPLKDN Kota Bandung selaku pihak yang berkompeten dalam penyediaan informasi Kios *3 in 1* Di Kota Bandung. Observasi ini mengenai cara dan metode yang digunakan dalam penyampaian informasi kegiatan-kegiatan yang ada di kios *3 in 1* melalui *website* http://kios3in1.net dan bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya aplikasi kios *3 in 1* ini.
2. Wawancara tidak terstruktur, yaitu sebuah cara yang dilakukan oleh penulis dengan berbicara secara langsung dengan narasumber untuk dijadikan data yang kemudian dianalisa. Wawancara dilakukan dengan aparatur Pemerintah yang ada di BBPLKDN khususnya di bagian *Customer Service Officer (CSO)* yang bertugas mengelola kios *3 in 1*. Pengumpulan data melalui wawancara sangat diperlukan karena dapat memperoleh data sejelas mungkin.
3. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan langsung dengan efektivitas penyampaian informasi tentang kios *3 in 1* melalui *website* http://kios3in1.net di BBPLKDN Bandung.
4. Dokumentasi, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada

BBPLKDN Bandung atau kegiatan pengumpulan bukti-bukti atau keterangan-keterangan tertulis yang dapat di jadikan informasi dalam mengolah laporan KKL.

1.6.3 Analisa Data

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Penulis dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* menyebutkan ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisis dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat. (Sugiyono, 2007:92-99).

Penulis menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang

terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Disamping itu data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

1.7 Lokasi dan Waktu KKL

Lokasi KKL dilaksanakan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No.170 A Telp/fax : (022) 2504467/(022) 7312564, email: indo2nvtdc.com, website: www.nvtdc.com. Adapun jadwal kegiatan KKL yang telah direncanakan selama 1 bulan yaitu dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011.

Tabel 1.1
Jadwal KKL

No.	Kegiatan	Tahun 2011			Tahun 2011		
		Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov
1.	**Tahap Persiapan**						
	a. Observasi lokasi KKL						
	b. Pengajuan judul						
	c. Penyusunan usulan KKL						
	d. Seminar usulan KKL						
2.	**Tahap Pelaksanaan**						
	a. Pelaksanaan KKL						
	b. Observasi						
	c. Studi Kepustakaan						
3.	**Tahap Akhir**						
	a. Penyusunan KKL						
	b. Seminar KKL						